

ANALISIS TIPOLOGI DAERAH BERDASARKAN INDIKATOR FUNDAMENTAL EKONOMI

REGIONAL TYPOLOGY ANALYSIS BASED ON FUNDAMENTAL ECONOMIC INDICATORS

Vivi Ukhwatul Khasanah Masbiran

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Jend. Sudirman No.51, Jati Baru, Padang Timur, Padang, Indonesia
e-mail: ukhwatul@yahoo.com

Diserahkan: 28/11/2019; Diperbaiki : 15/12/2019; Disetujui: 22/12/2019

Abstrak

Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan daerah yang menjadi prioritas pembangunan untuk pencapaian indikator kinerja makronya merupakan hal yang sangat penting dalam sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode 2010-2018 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan daerah prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data didapatkan dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, yaitu pembagian 4 (empat) empat kuadran berdasarkan indikator fundamental: ekonomi dan kesejahteraan. Hasil analisis tipologi berdasarkan indikator ekonomi menunjukkan ada 7 (tujuh) kabupaten pada kuadran Daerah Tertinggal, 5 (lima) kabupaten pada kuadran Daerah Maju, 4 (empat) kabupaten pada kuadran Daerah Maju Tapi Tertekan, dan 3 (tiga) kabupaten pada kuadran Daerah Berkembang Cepat. Berdasarkan indikator kesejahteraan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan IPM tinggi adalah daerah administratif Kota, sedangkan daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM rendah didominasi oleh daerah kabupaten.

Kata Kunci: Tipologi Daerah, Tipologi Klassen, Ekonomi, Kesejahteraan

Abstract

Equitable economic growth and the quality of human resources are one of the targets in the medium-term planning documents of Sumatera Barat Province. The determination of the areas that are the development priorities for achieving macro performance indicators is very important in the government sector. This study aims to identify the typology of districts / cities in Sumatera Barat during the period of 2010-2018 as an evaluation of the government in determining the priority areas of development to achieve equity. The research method used is a quantitative method with descriptive analysis. Sources of data obtained from BPS of Sumatera Barat Province. Data were analyzed using Klassen's typology, which divides four quadrants based on fundamental indicators namely economic and welfare indicators. The results of typology analysis based on economic indicators show that there are 7 (seven) districts in the Developing Regions quadrant, 5 (five) districts in the Advanced Regional quadrant, 4 (four) districts in the Developed but Depressed Regional quadrant, and 3 (three) districts in Fast Developing Regional quadrant. Based on welfare indicators, regions that have high per capita income and HDI are City Administrative Regions, while regions with low per capita income and HDI are dominated by Regency.

Keywords: Regional Typology, Klassen Typology, Economy, Welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan yang bersifat absolut yang dinikmati oleh setiap individu dan kelompok masyarakat, maupun kesejahteraan yang bersifat relatif dalam arti pemerataan kesejahteraan atau keadilan (LAN 2004). Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam hal (1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, (2) peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, pendidikan, perhatian terhadap budaya dan nilai kemanusiaan (Todaro 2006). Ukuran keberhasilan lainnya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor (Kuncoro 2004).

Sasaran fundamental yang ingin dicapai dalam pembangunan suatu daerah meliputi : (1) peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, (2) peningkatan pendapatan per kapita, dan (3) pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta (4) peningkatan kualitas pembangunan manusia. Indikator-indikator ini pada hakikatnya mencerminkan kondisi ril ekonomi daerah dan penyusunan target-targetnya merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi daerah untuk ukuran keberhasilan pemerintahnya (Kuncoro 2015).

Indikator ekonomi diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh Pertumbuhan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan PDRB per kapita menjadi salah satu unsur penting dan penentu utama proses pembangunan nasional dan daerah. Suatu daerah dapat tumbuh lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung potensi ekonomi daerah dan pengaruh dari daerah sekitarnya dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menjadi target utama dalam penyusunan rencana

pembangunan nasional dan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Sjafrizal 2018).

Konsep klasik teori pertumbuhan ekonomi regional Myrdal menyatakan bahwa pendapatan regional daerah yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran daerah dan akumulasi ekspor dan impor serta dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi daerah tetangga yang lokasinya berdekatan. Model ekonomi antar daerah menguraikan bahwa tingkat pertumbuhan dipengaruhi oleh volume ekspor, perdagangan antar daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lainnya yang terkait. Sementara model neo klasik memberikan hipotesis bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi (Sjafrizal 2018). Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kualitas pembangunan manusia, karena kualitas pembangunan manusia yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kegiatan produksinya.

Namun, indikator ekonomi disadari tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena ketidaksempurnaan penghitungan dan pengaruh faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan, sehingga digunakan indikator kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah merangkum aspek kesehatan dan pendidikan, pangan, sandang dan perumahan menjadi satu kesatuan dengan tingkat pendapatan (Badrudin 2017). Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dan terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia yang direfleksikan dalam wujud perbaikan kualitas masyarakat (Badrudin 2012).

Penentuan tipologi berdasarkan indikator ekonomi khususnya untuk melihat struktur dan pola pertumbuhan ekonomi yang populer adalah dengan melakukan analisis tipologi klassen. Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi sebagai menjadi acuan dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita antar daerah. Penentuan tipologi di wilayah Indonesia pada tahun 2004-2010 mengidentifikasi bahwa daerah DKI dan Papua Barat adalah daerah yang cepat maju dan tumbuh, daerah maju tapi tertekan adalah Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung sementara daerah lainnya di Indonesia berada pada posisi berkembang dan tertinggal (Kuncoro 2015). Tipologi klassen digunakn sebagai arahan untuk kebijakan penyerasian pengembangan wilayah dengan pendekatan tipologi berdasarkan ekonomi, spatial dan lingkungan di Provinsi DIY, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Bali dengan menggunakan data tahun 2012 dan diperoleh hasil bahwa rata-rata daerahnya masih banyak daerah yang tergolong tertinggal dan memiliki kesenjangan pola pertumbuhan ekonomi wilayah (Riza Fathoni I 2014). Sementara itu untuk keseluruhan provinsi di Indonesia juga diketahui bahwa sebaaian besar provinsi di Indonesia pada periode 2011-2013 termasuk dalam daerah berkembang cepat (Sarnowo 2017). Untuk tingkatan daerah Kabupaten, tipologi klassen juga digunakan untuk menentukan kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan melalui kondisi struktur pertumbuhan ekonomi yang berada pada posisi daerah maju dan cepat berkembang (Rahayu and Santoso 2014). Pada daerah Jawa Timur, pada daerah yang lebih maju dengan penentuan tipologi klassen menunjukkan kontribusi

penyumbang PDRB yang jauh lebih besar dibanding daerah lainnya (Satria 2016).

Penelitian tentang IPM telah banyak dilakukan. Sebagian besar meneliti tentang pengaruh dan hubungan kausalitas namun masih sedikit yang membahas tipologi berdasarkan IPM. Seperti penelitian terkait yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat IPM masih belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia (Susilowati, Sri, and Suliswanto 2015). Sedangkan peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) berpengaruh positif terhadap IPM, karena peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan penduduk (Setiawan and Hakim 2013). IPM berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Nurmainah 2013). Pertumbuhan ekonomi bisa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara kualitas sumber daya manusia tidak selalu berpengaruh terhadap tingginya nilai pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan ekonomi bisa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara kualitas sumber daya manusia tidak selalu berpengaruh terhadap tingginya nilai pertumbuhan ekonomi (Muslikhati 2018). Berdasarkan penentuan tipologi di Sumatera Selatan diketahui bahwa daerah yang kaya sumber daya alam justru memiliki IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan IPM tertinggi dimiliki oleh pusat pertumbuhan ibu kota provinsi (Bambang Bemby.S; Abdul Bashir 2015). Sementara untuk wilayah indonesia diperoleh hasil bahwa terdapat daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusia tinggi, pendapatan tinggi namun pembangunan manusia rendah dan pembangunan manusia tinggi namun pendapatan rendah serta daerah relatif tertinggal baik pendapatan maupun pembangunan manusia (Kuncoro 2015).

Indikator fundamental ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita dan IPM menunjukkan representasi keadaan riil ekonomi suatu daerah. Perkembangan indikator pembangunan Sumatera Barat khususnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota tahun 2010 sampai dengan 2018, nilainya tidak terlalu berfluktuatif dan cenderung merata tumbuh pada rentang 4 sampai dengan lima persen pada tahun 2010 maupun tahun 2018. Sementara untuk PDRB per kapita, terjadi kenaikan hampir 100% pada tahun 2018 dari rata-rata perkapita tahun 2010. Pendapatan perkapita daerah Kabupaten/Kota berkisar antara Rp.13 juta sampai dengan Rp.32 juta pada Tahun 2010 dan menjadi kisaran Rp.29 juta - Rp.62 juta pada tahun 2018. Pendapatan daerah kabupaten/kota tertinggi adalah dua kali lipat pendapatan per kapita daerah terendah dan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain di Sumatera Barat. Walaupun secara trend, pendapatan per kapita daerah di Sumatera Barat cenderung meningkat namun dibandingkan daerah lain di Indonesia nilainya masih jauh di bawah rata-rata. Secara nasional, pendapatan per kapita provinsi Sumatera Barat yaitu Rp.25,9 juta masih dibawah rata-rata pendapatan per kapita provinsi seluruh Indonesia pada tahun 2010-2018 sebesar Rp. 36,9 juta.

Kualitas pembangunan manusia Sumatera Barat menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2010 adalah 67 dan menjadi 71 pada tahun 2018, terjadi kenaikan 4 poin atau 6% dari 8 tahun sebelumnya. Pada tingkat nasional, IPM Provinsi Sumatera Barat telah masuk kedalam kategori daerah dengan IPM tinggi yaitu 71,73 dan berada diatas rata-rata IPM Nasional (71,39). Ditinjau dari indeks per daerahnya lebih dari separuh daerah masuk kategori IPM sedang dan sisanya adalah daerah dengan tingkat IPM tinggi bahkan sangat tinggi, namun masih

terdapat daerah dengan kualitas pembangunan manusia rendah dan masuk daerah kelompok daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Ditinjau dari struktur lapangan usaha Sumatera Barat, sekitar 35,17 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,55 persen atau senilai dengan Rp.50,54 triliun. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sumatera Barat adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,05 persen, selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar 12,64 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 9,71 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,32 persen, dan lapangan usaha lainnya menyumbang sebesar 29,72 persen

Permasalahan yang dikemukakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah terkait struktur ekonomi ini adalah struktur ekonomi Sumatera Barat belum mengarah ke struktur yang ideal dan peranan sektor industri pengolahan masih minim dan belum dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Sementara itu perlunya penanganan terhadap kualitas pembangunan manusia agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2018). Terkait pusat pertumbuhan juga diuraikan bahwa pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018). Selain itu juga ditetapkan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Tahap 3 (2016-2021) secara umum ditujukan untuk pembangunan agama dan budaya, pemerintahan dan hukum, sumber daya manusia, pembangunan ekonomi serta

tata ruang dan lingkungan hidup. Selanjutnya pemerataan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah menjadi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai pada setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi daerah dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan, perlu dilakukan penentuan tipologi berdasarkan indikator fundamental ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan tipologi berdasarkan indikator ekonomi dengan mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan yang digambarkan oleh kualitas sumber daya manusia berdasarkan indikator IPM. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi juga digambarkan dalam periode tahunan yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penentuan tipologi ini sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan daerah prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerataan sesuai dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan dijabarkan melalui program dan kegiatan. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah yang relatif tertinggal dan seyogyanya dapat menjadi acuan pemerintah maupun investor untuk memilih lokasi investasi berdasarkan kemajuan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh BPS Prov. Sumatera Barat pada Tahun 2010-2018 dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan berasal dari dokumen laporan yang dipublikasikan oleh BPS, Bappenas dan artikel dari *website* resmi pemerintah, peraturan daerah serta laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan

untuk mendapatkan gambaran tipologi daerah berdasarkan indikator fundamental ekonomi daerah yang direpresentasikan oleh indikator ekonomi dan kesejahteraan adalah dengan menggunakan tipologi klasen. Untuk mendapatkan tipologi berdasarkan indikator ekonomi dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi dan kriteria klasifikasi berdasarkan tipologi Klassen berdasarkan indikator ini seperti terangkum pada tabel 1. Variabel y_i merupakan pendapatan perkapita daerah i , dan Y adalah pendapatan per kapita rata-rata daerah di provinsi dan sementara r_i adalah laju pertumbuhan daerah i dan r merupakan laju pertumbuhan rata-rata daerah di provinsi.

Tabel 1. Pengelompokan Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r) PDRB per kapita (y)	$r_i \geq r$	$r_i < r$
	$y_i \geq Y$	Daerah maju
$y_i < Y$	Daerah berkembang	Daerah Relatif Tertinggal

Sumber : Sjafrizal (2008) dan Kuncoro (2015)

Kriteria untuk membagi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu ; 1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat; 2) daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat; 3) daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi pendapatan per kapitanya rendah; dan 4) merupakan

daerah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat.

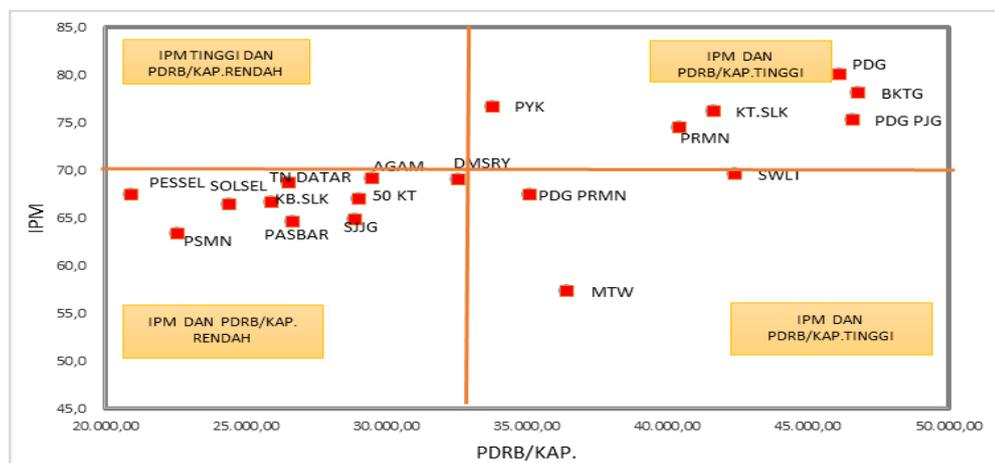
Sementara untuk analisis tipologi Klassen berdasarkan indikator kesejahteraan juga dipetakan dengan membandingkan indikator pertumbuhan ekonomi dengan IPM dan pendapatan perkapita dengan IPM. Dengan menentukan rata-rata IPM sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal dan demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Kriteria indikator disebut tinggi apabila indikator suatu daerah melebihi rata-rata indikator wilayah (Kuncoro 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Ekonomi

Untuk mengetahui tipologi daerah berdasarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dilakukan identifikasi berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi

daerah dan pendapatan per kapita daerah yang diproksikan dengan pertumbuhan PDRB dan PDRB/Kapita Kabupaten/Kota. PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perencanaan pembangunan ekonomi dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan dan memonitoring perkembangan kemajuan perekonomian (BPS 2019). Daerah yang diamati dapat dipetakan menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal seperti tergambar pada Gambar 2. Tipologi berdasarkan kuadran ini akan menghasilkan kesimpulan yang sedikit berbeda dari deskripsi tipologi tahunan, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan karena pada empat kuadran ini yang diambil adalah berdasarkan rata-rata indikator selama tahun 2010-2018, sehingga akan sangat dipengaruhi terhadap klasifikasi yang dominan selama periode penelitian.



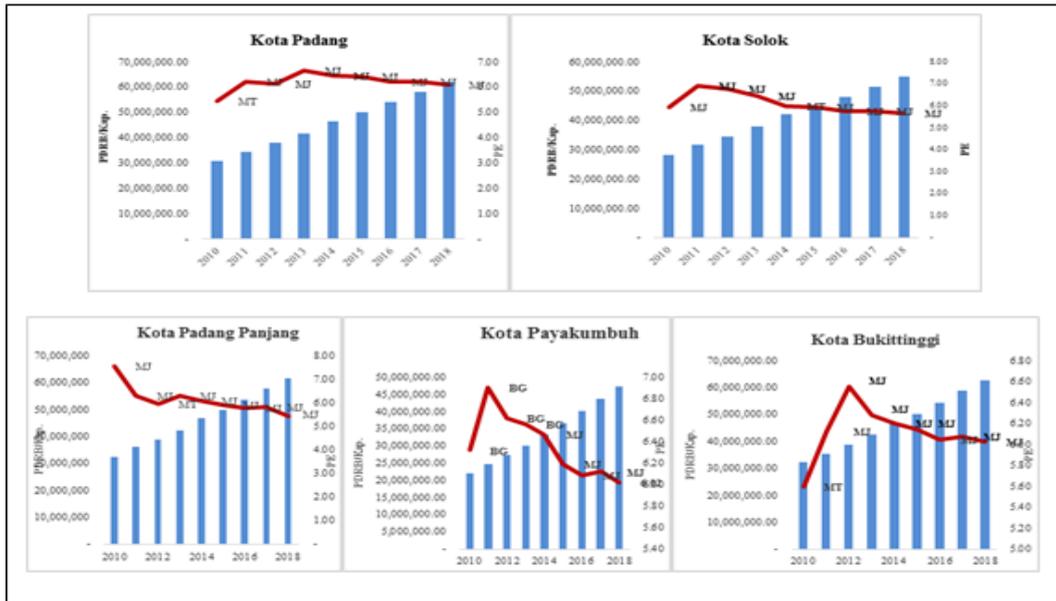
Gambar 1. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menurut tipologi daerah
 (Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

PESSSEL	: Kab.Pesisir Selatan	50 KT	: Kab. 50 Kota	MTW	: Kab.Kp.Mentawai
PSMN	: Kab. Pasaman	PASBAR	: Kab. Pasaman Barat	KT SLK	: Kota Solok
SLK SLTN	: Kab. Solok Selatan	DMSRY	: Kab. Dharmasraya	PDG	: Kota Padang
T.DTR	: Kab.Tanah Datar	PYK	: Kota Payakumbuh	PDG PJG	: Kota Padang Panjang
KB. SLK	: Kab.Solok	PD.PRMN	: Kab. Padang Pariaman	BKTG	: Kota Bukittinggi
SJJG	: Kab. Sijunjung	KT PRMN	: Kota Pariaman		
AGM	: Kab. Agam	SWLT	: Kota Sawahlunto		

Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh

Kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan tipologi daerah dapat dipetakan daerah yang

termasuk daerah cepat maju dan tumbuh adalah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Untuk mengetahui perkembangan masing-masing klasifikasi daerah dilakukan identifikasi secara tahunan dan hasil identifikasi tipologi seperti tergambar pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan tipologi cepat maju dan cepat tumbuh

Ket ; MJ : Maju; MT : Maju Tertekan; BG : Berkembang; RT : Relativ Tertinggal

(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pusat perdagangan, pendidikan, jasa dan lainnya menjadikannya Kota Padang menjadi daerah yang tergolong cepat maju dan tumbuh. Kota Padang juga menunjukkan dominasinya terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dengan sektor jasa sebagai sektor basis atau unggulan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber ekonomi dan fasilitas faktor produksi yang memadai. Selanjutnya Kota Solok juga merupakan daerah yang masuk ke dalam kategori maju. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor penggerak utama kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kota Solok yang

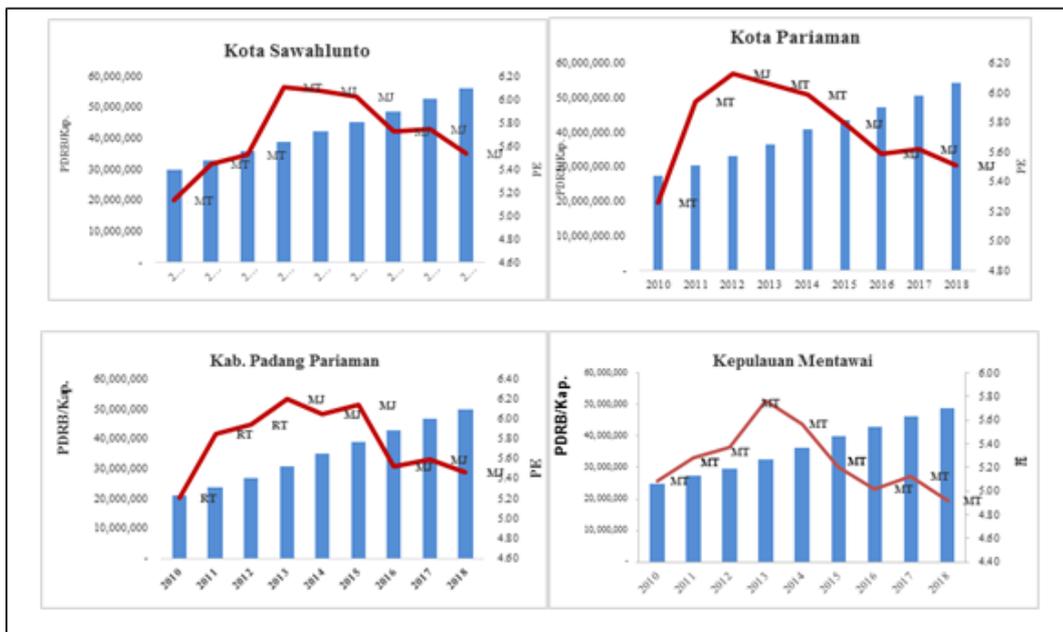
perkembangannya hingga saat ini cukup baik dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor yang sangat potensial. Hal ini didukung oleh letak Kota Solok yang strategis karena berada di persimpangan jalur lalu-lintas perekonomian Sumatera Barat, selain juga dukungan dari sektor pertanian. Sementara Kota Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh merupakan daerah yang saling berdekatan dan perekonomian daerahnya didominasi oleh sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, sewa dan jasa) (Badan Pusat Statistik 2018). Bukittinggi sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia pada

masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Sehingga daerah ini merupakan termasuk daerah yang paling maju di Provinsi Sumatera Barat. Sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor andalan yang menopang perekonomian Kota Bukittinggi dan Kota Bukittinggi juga merupakan indikator inflasi Sumatera Barat dan terbukti juga mampu menjadi pendorong daerah-daerah sekitarnya seperti Kota Padang Panjang dan Payakumbuh. Ditinjau dari perkembangannya daerah-daerah dalam klasifikasi ini telah menjadi daerah maju semenjak tahun 2010 sampai dengan

tahun 2018. Kota Payakumbuh pada lima tahun sebelumnya merupakan daerah berkembang menjadi daerah yang maju hingga tahun 2018.

Maju tapi tertekan

Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat. Daerah yang termasuk klasifikasi maju tapi tertekan adalah Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Gambar 3. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan tipologi maju tertekan

(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Sementara itu untuk tipologi maju tapi tertekan, untuk daerah perkotaan adalah Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman yang dominasi sektor usahanya adalah tersier. Kota Sawahlunto yang memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ombilin dan menjadikannya daerah dengan pengadaan listrik sebagai sektor yang paling potensial. Sementara untuk Kota Pariaman memiliki sektor akomodasi, makanan dan jasa sebagai sektor unggulan menjadikannya daerah

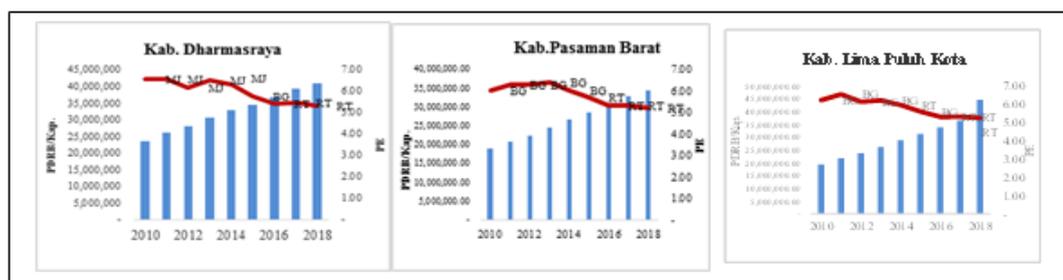
dengan pendapatan tinggi namun tumbuh lambat. Kabupaten Padang Pariaman dengan sektor unggulan penggalian yang sejalan dengan transportasi menjadikannya daerah berpendapatan tinggi namun tumbuh lambat. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan daerah berpendapatan tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah memiliki sektor pertanian dan perikanan yang menjadi unggulan. Dari gambar 3

diketahui bahwa daerah kota merupakan daerah dengan tipologi maju, namun berdasarkan rata-rata akibat dominasi pertumbuhan ekonomi yang rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadikannya daerah maju tertekan. Sementara itu, dilihat dari perkembangannya berada pada tipologi ini merupakan hal yang lebih baik dari sebelumnya karena sebelumnya daerah ini merupakan daerah relatif tertinggal dan berhasil menjadi daerah yang berpendapatan tinggi. Sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah berpendapatan tinggi namun pertumbuhan ekonominya tergolong paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang tinggi hanya dirasakan sekelompok

orang tertentu dengan nominal yang sangat tinggi, namun penduduk aslinya masih kurang merasakan pendapatan tersebut.

Berkembang Cepat

Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, tapi pendapatan per kapitanya rendah dan daerah pada tipologi ini pada dasarnya adalah daerah dengan potensi pengembangan yang sangat besar namun belum dimanfaatkan sepenuhnya secara optimal. Daerah yang berkembang cepat adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 4. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan tipologi berkembang cepat

(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Daerah pemekaran seperti Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat di Sumatera Barat menjadi daerah yang berkembang dengan cepat dibanding daerah lainnya yang masih tertinggal. Walaupun pada tiga tahun terakhir merupakan daerah relatif tertinggal, namun jika dirata-ratakan menjadi daerah berkembang dan sebelumnya daerah ini merupakan daerah maju dan berkembang. Dharmasraya memiliki potensi tambang dan galian sementara pasaman barat memiliki keunggulan di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lima Puluh Kota juga merupakan daerah yang berkembang walaupun dalam perkembangan tahunannya pada tiga tahun terakhir juga merupakan daerah tertinggal, namun sebelumnya merupakan daerah tertinggal dan daerah

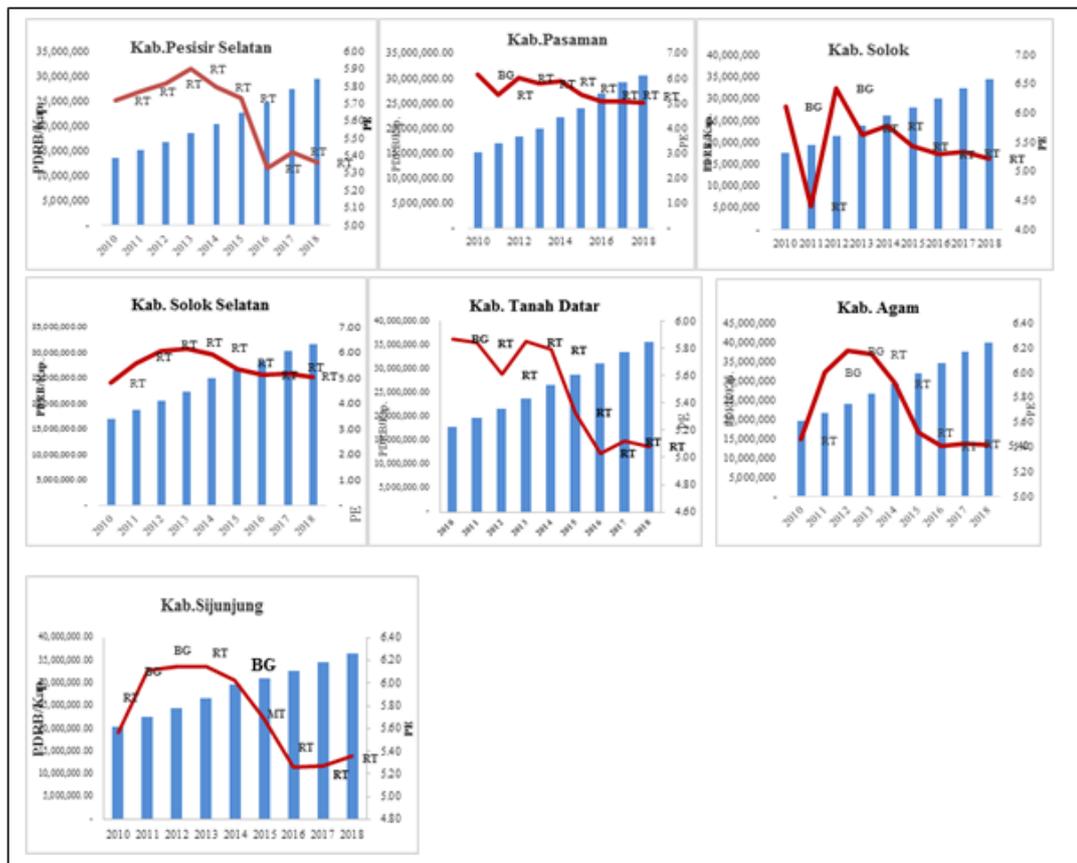
ini juga dapat mengandalkan sektor tambang dan galian berdasarkan perhitungan LQ-nya (Badan Pusat Statistik 2018).

Daerah relatif tertinggal

Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah daerah yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi daerah maupun pendapatan masyarakatnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah pada tipologi ini lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Barat. Daerah yang masuk dalam kelompok relatif tertinggal adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten

Sijunjung. Daerah kabupaten yang sektor usahanya di dominasi sektor primer atau pertanian, kehutanan dan perikanan di Sumatera Barat sebagian besar merupakan daerah relative tertinggal. Selain sektor pertanian juga terdapat Kabupaten yang memiliki potensi terhadap sektor pertambangan dan penggalian seperti Kabupaten Solok

Selatan dan Sijunjung. Kabupaten Agam seharusnya bisa mendapat efek rembesan dari daerah tetangga yang merupakan daerah maju, begitu juga dengan Kabupaten yang memiliki potensi tambang, apabila dikelola dengan baik dan aturan yang jelas seyogyanya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya.



Gambar 5. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan tipologi relatif tertinggal

(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Berdasarkan tipologi 19 Kabupaten dan/Kota dapat diketahui bahwa daerah relative tertinggal lebih banyak dibandingkan klasifikasi kelompok lainnya. Dari tujuh wilayah administrative kota, hampir seluruhnya masuk ke dalam kelompok daerah cepat maju dan cepat tumbuh sementara untuk wilayah Kabupaten, lebih dari separuh daerahnya adalah daerah relative tertinggal. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara daerah Kabupaten dan Kota. Perbedaan

karakteristik antara wilayah kabupaten dan kota juga akan mempengaruhi tipologi daerah tersebut. Pada umumnya wilayah administrative kota dan kabupaten memiliki beberapa perbedaan antara lain kota biasanya merupakan pusat perdagangan, pelayanan jasa, tersedianya prasarana perkotaan dan fasilitas sosial dan adanya pusat komunikasi (Robinson Tarigan 2012). Sementara kabupaten seringkali adalah kebalikan dari ciri yang umumnya ditemui dari wilayah administrative kota.

Kabupaten memiliki wilayah luas yang masih memiliki banyak daerah tertinggal yang masih sulit untuk mendapatkan pemerataan pembangunan termasuk sarana prasarana dan fasilitas sosial karena terbatasnya anggaran. Kemudian kabupaten bercirikan mata pencaharian yang umumnya dibidang pertanian dan aktivitas ekonomi dan pendapatannya yang juga jauh lebih kecil dibandingkan daerah kota (Prud'homme 1995).

Daerah perkotaan di Sumatera Barat, sebaran ekonominya didominasi oleh sektor tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan). Sementara daerah kabupaten lebih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan tipologi rata-rata maupun tahunan menunjukkan bahwa daerah perkotaan lebih maju dibanding kabupaten. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mendominasi daerah kabupaten merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat. Sekitar 35,17 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini terhadap perekonomian Sumatera Barat yakni sebesar 23,55 persen atau senilai Rp50,54 triliun. Namun kondisi faktual sektor ini tumbuh melambat, lahan pertanian di Sumatera Barat telah banyak yang mengalami alih fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan dan perkantoran. Walaupun pembukaan sawah baru dilakukan setiap tahunnya, di beberapa daerah ternyata pemanfaatan sawah masih sangat rendah sehingga banyak terdapat lahan tidak produktif (Astuti et al. 2018). Hal ini sejalan dengan psikologis masyarakat Sumatera Barat yang gemar merantau untuk berdagang atau bekerja di kota besar dibanding membangun kampung halaman sendiri yang prospeknya dianggap kurang menguntungkan.

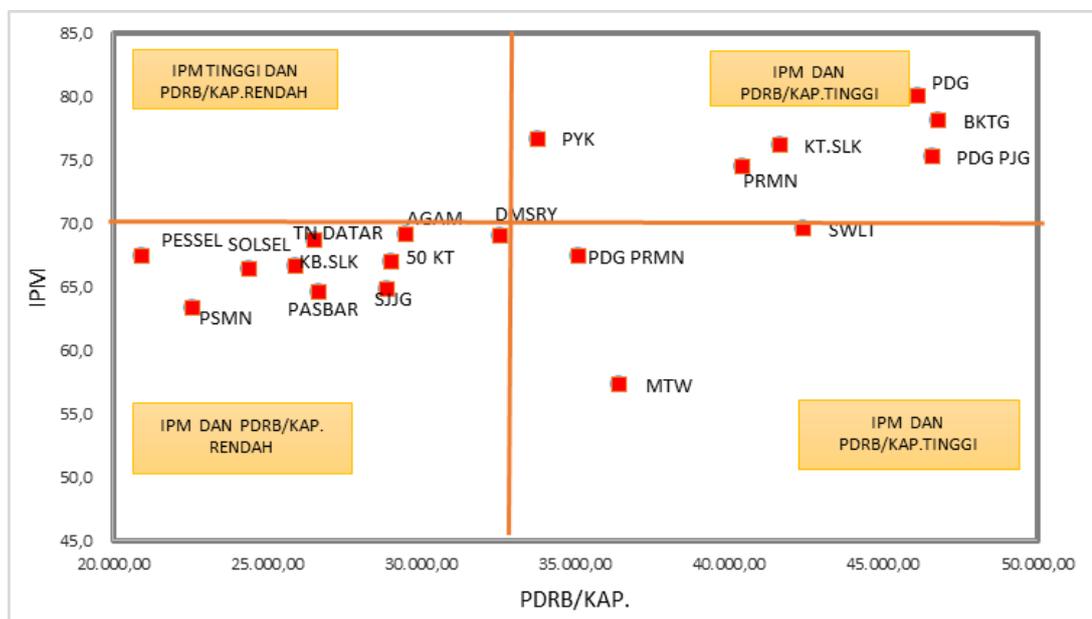
Sementara daerah kota pada umumnya mengalami transformasi dari sektor primer kepada sektor non primer khususnya tersier yang memang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang merupakan transformasi dari sektor pertanian ke sektor sekunder (industri), namun dalam pengembangan lapangan usaha ini sangat tergantung sumber daya industri dan modal yang tersedia untuk terutama industri sedang dan besar. Oleh karenanya di beberapa daerah transformasi yang terjadi mengalami loncatan dari primer (pertanian) ke sektor tersier (jasa) (Badan Pusat Statistik 2018).

Selain itu, daerah maju berkumpul di antara kota yang berdekatan atau melewati 2 (dua) daerah yang pusat pertumbuhan seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang berdampak terhadap daerah-daerah didepan maupun dibelakangnya, walaupun terdapat satu daerah seperti Kabupaten Agam yang belum terdampak seperti daerah lain disekitarnya. Pusat pertumbuhan disini dapat dimaknai secara fungsional dan geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional bercirikan konsentrasi kelompok usaha atau industri tertentu yang dinamis sehingga dapat menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (wilayah belakangnya). Sementara secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang membuat berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut (Robinson Tarigan 2012). Seperti halnya Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi yang terkenal sebagai sentra perdagangan Sumatera Barat. Bervariasinya klasifikasi tipologi ini yang tersebar dalam empat kuadran mendukung pendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah dalam waktu yang sama.

Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan

Selanjutnya dilakukan identifikasi tipologi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu IPM dan pendapatan per kapita daerah seperti yang dilakukan untuk mengidentifikasi tipologi di Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan (Kuncoro 2015) (Bambang Bemby.S;Abdul Bashir 2015). Dengan menggunakan rata-rata IPM sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal,

daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu: 1) Daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya tinggi; 2) Daerah dengan pendapatan tinggi namun pembangunan manusianya rendah; 3) Daerah dengan pembangunan manusia tinggi, namun pendapatannya rendah, 4) Daerah relatif tertinggal baik dalam pendapatan maupun pembangunan manusia. Berdasarkan kriteria ini maka dapat digambarkan tipologi daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Tipologi Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan PDRB/Kapita Tahun 2010-2018

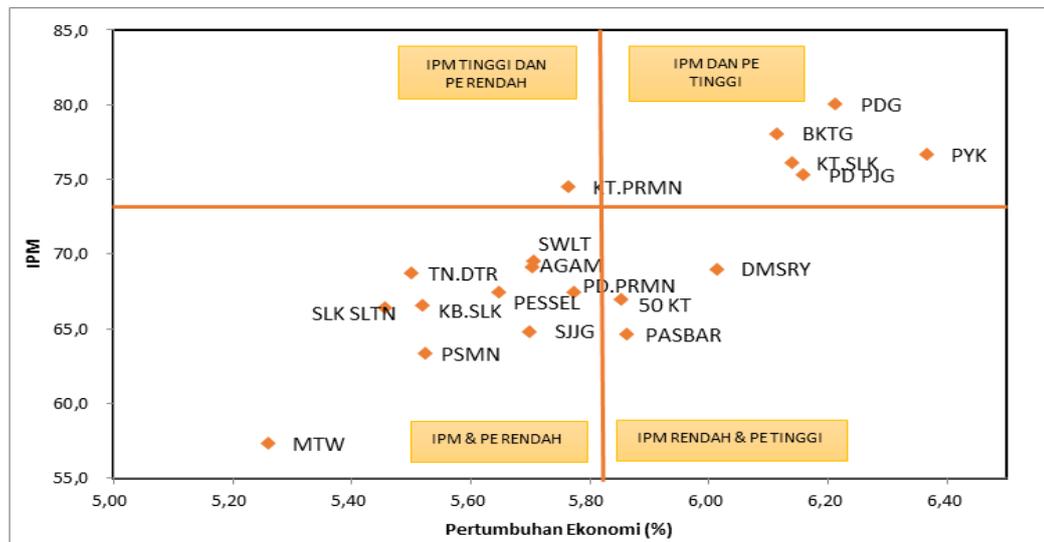
(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Pemetaan dengan kriteria empat kuadran diperoleh hasil bahwa daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat berada pada wilayah tiga kuadran yaitu kuadran I, III dan IV dan tidak terdapat daerah yang berada di kuadran dua yaitu daerah yang termasuk klasifikasi pendapatan rendah dan pembangunan manusianya tinggi. Daerah yang berada pada kuadran I merupakan daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya tinggi, yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Kuadran III yaitu daerah

dengan pendapatan rendah dan pembangunan manusianya rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan kabupaten 50 Kota serta Kabupaten Pasaman dan Solok Selatan serta Kabupaten Dharmasraya. Sementara di kuadran IV merupakan daerah yang termasuk klasifikasi pendapatan tinggi tetapi pembangunan manusianya rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu juga dapat dipetakan klasifikasi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM seperti tergambar pada gambar 8, sehingga diperoleh hasil pemetaan 4 (empat) kuadran yaitu Kuadran I (pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi) yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh; Kuadran II (pertumbuhan ekonomi rendah namun IPM tinggi) yaitu Kota Pariaman;

(pertumbuhan ekonomi & IPM rendah) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Solok Selatan; dan Kuadran IV (pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi IPM rendah) yaitu Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 7. Tipologi Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2018
(Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/>, data diolah)

Konsep pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan rangkuman indeks komposit yang diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Berdasarkan hasil pemetaan diatas dapat digambarkan bahwa daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia yang baik adalah daerah yang umumnya memiliki baik pendapatan per kapita yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kriteria ini melekat pada seluruh daerah

administrative kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti oleh pembangunan manusianya. Daerah kabupaten yang pada umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi rendah, memiliki ciri kualitas manusia yang juga rendah dan umumnya daerah-daerah yang cepat berkembang masih memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah namun pertumbuhan ekonomi tinggi. Hasil ini mendukung temuan bahwa peningkatan pendapatan akan memperbaiki kualitas manusia (Setiawan and Hakim 2013). Terkait pendapatan perkapita, juga sejalan dengan kualitas manusianya. Pendapatan rendah, IPM juga rendah dan sebaliknya dan untuk di

Sumatera Barat belum ada daerah yang masuk klasifikasi pendapatan rendah namun pembangunan manusianya tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan pendapatan sangat menunjang perbaikan kualitas manusianya.

Penentuan tipologi daerah seperti sebelumnya yang dilakukan pada indikator ekonomi akan berbeda hasilnya dengan status pembangunan manusia dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPS karena pada tipologi yang dibandingkan adalah rata-ratanya. Ditinjau dari perkembangan IPM Kabupaten Kota, nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan kriteria BPS, lebih dari separuh daerah masuk kategori IPM sedang dan sisanya adalah daerah dengan tingkat IPM tinggi bahkan sangat tinggi, namun masih terdapat daerah dengan kualitas pembangunan manusia rendah dan masuk daerah kelompok daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Daerah dengan status IPM yang sangat tinggi ini adalah Kota Padang dan daerah kota lainnya dengan status IPM tinggi dan daerah Kabupaten umumnya dengan status IPM sedang.

Kota Padang merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian dan lainnya. Akses pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana lebih memadai di Kota Padang dibanding kota lainnya dan menjadikan Kota Padang menarik bagi sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi dan tentunya hal ini sangat menunjang Kota Padang dalam capaian pembangunan manusia. Kondisi sebaliknya dialami oleh daerah Kabupaten, ketersediaan sarana prasarana dan akses pendidikan dan kesehatan masih agak terbatas dibandingkan daerah administrative kota. Sementara untuk daerah tertinggal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut adalah Kabupaten Kepulauan mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat yang memang merupakan

daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang rendah. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan status rendah walaupun pada Tahun 2018 telah meningkat menjadi status sedang dan BPS mencatat pada tahun 2017-2018 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan pertumbuhan IPM paling tinggi. Harapannya daerah ini akan segera keluar dari status tertinggal seiring dengan perbaikan kualitas manusianya.

Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Sumatera Barat telah mencapai level “tinggi” dan hal ini sangat dipengaruhi oleh dari peningkatan setiap komponennya (BPS). Salah satu komponen IPM yang perlu mendapat perhatian adalah rata-rata tingkat pendidikan Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,76 tahun pada tahun 2018 atau dengan kata lain penduduk di Provinsi Sumatera Barat baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 3 SLTP dan masih tingginya angka penduduk yang bekerja dengan latar pendidikan SD ke bawah (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2018).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan Indikator ekonomi tipologi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kuadran dengan pengelompokkan daerah cepat maju dan cepat tumbuh, maju tapi tertekan, berkembang cepat dan daerah relative tertinggal. Dominasi kelompok daerah terbesar adalah daerah relative tertinggal sebanyak tujuh daerah. Sementara itu yang termasuk kelompok daerah maju sebanyak lima daerah dan empat daerah maju tapi tertekan. Selanjutnya terdapat tiga daerah yang termasuk daerah berkembang cepat. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan kemajuan daerah di Sumatera Barat dan dengan dominasi tipologi daerah adalah relatif tertinggal atau yang masih lambat tumbuh dan pendapatan per kapita daerahnya dibawah rata-rata daerah lainnya dan daerah administrative kabupaten

cenderung masih jauh tertinggal dibandingkan daerah administrative kota

Berdasarkan indikator kesejahteraan digambarkan bahwa 63% pengelompokan daerah berada pada dominasi daerah dengan kualitas manusia yang masih rendah. Tipologi daerah berdasarkan indikator kesejahteraan yang dipetakan berdasarkan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa daerah Sumatera Barat berada pada wilayah tiga kuadran yaitu kuadran I, III dan IV dan tidak terdapat daerah yang berada di kuadran dua yaitu daerah yang termasuk klasifikasi pendapatan rendah dan pembangunan manusianya tinggi. Daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya tinggi yaitu semua daerah administrative kota sebanyak tujuh daerah. Daerah dengan pendapatan rendah dan pembangunan manusianya rendah adalah hampir seluruh daerah Kabupaten sebanyak 10 daerah. Sementara daerah yang termasuk klasifikasi pendapatan tinggi tetapi pembangunan manusianya rendah sebanyak dua daerah. Daerah yang berpendapatan tinggi menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang baik dan begitupula sebaliknya.

Pemetaan klasifikasi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM yaitu (1) daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan pembangunan manusianya tinggi yaitu lima daerah administratif kota, (2) daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah namun pembangunan manusianya tinggi yaitu satu daerah administratif kota (3) daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah dan begitu juga dengan pembangunan manusianya adalah delapan daerah kabupaten (4) daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi pembangunan manusianya rendah yaitu tiga daerah kabupaten dengan dominasi daerah pemekaran. Daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih baik sangat mendukung untuk perbaikan kualitas manusianya.

Rekomendasi

Dengan beragamnya tipologi daerah di Provinsi Sumatera Barat dan dominasi daerah tertinggal dan pembangunan manusianya yang tergolong masih rendah maka prioritas pembangunan hendaknya diarahkan untuk mendorong perkembangan daerah-daerah yang masih tertinggal. Perlu dilakukan strategi-strategi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membuka lapangan kerja baru, mengembangkan basis ekonomi atau sektor unggulan dan potensial, program pembangunan hendaknya diarahkan ke pengembangan fisik seperti (1) penyediaan infrastruktur yang dapat menjadi faktor pendorong bagi calon investor dan dunia usaha, penataan daerah dan pembangunan fisik lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja, (2) pengembangan dunia usaha melalui insentif terhadap UMKM, penciptaan iklim usaha yang baik melalui regulasi yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha mengingat dunia usaha Sumatera Barat didominasi UMKM (3) pengembangan ekonomi masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat.

Untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu fokus dan prioritas terhadap daerah yang tergolong daerah indikator IPM rendah dibandingkan rata-rata provinsi khususnya daerah yang pendapatannya rendah dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Pemerintah. Komponen pembentuk IPM yang perlu mendapat perhatian adalah lama sekolah dengan kemudahan masuk sekolah, akses jarak sekolah dan biaya sekolah maupun pendidikan yang relatif terjangkau yang seringkali menjadi pemicu masyarakat putus sekolah. Sementara itu pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan pelatihan berdasarkan

keahlian adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kualitas pembangunan manusia yang baik disuatu daerah akan dapat meningkatkan produktivitas suatu daerah dan berdampak terhadap pertumbuhan maupun peningkatan pendapatan per kapita daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Nuraini Budi, Yusri Usman, Rusda Khairati, and Elfi Rahmi. 2018. "Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Perluasan Sawah: Antara Harapan Dan Kenyataan." Padang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. "Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kab/Kota (ribu rupiah), 2010-2018". diakses tanggal 20 Oktober 2019. <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2018/10/16/172/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kab-kota-ribu-rupiah-2010-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. "Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota, 2010 - 2018". diakses tanggal 20 oktober 2019. <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2018/10/18/178/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-2010---2018.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat, 2010-2018 (Metode Baru). diakses tanggal 21 oktober 2019. <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2016/10/05/23/indeks-pembangunan-manusia-ipm-provinsi-sumatera-barat-2010-2018-metode-baru-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2018. *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat (Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017)*. Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2018*. Provinsi Sumatera Barat.
- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Bambang Bemby.S.;Abdul Bashir. 2015. "Analisis Tipologi Dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan." *Ekonomi Dan Pembangunan* 13 (1): 21–36.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2018. "Penyempurnaan Materi Teknis Proses Legalisasi Revisi Rtrw Provinsi Sumatera Barat." Provinsi Sumatera Barat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang Pengarang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi UPP STIM YKPN Yogyakarta 2015*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- LAN, Tim Litbang PK2PA I. 2004. "Evaluasi Kinerja Pembangunan Pra Dan Pasca Pemekaran Wilayah; Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Tasikmalaya." <http://litbang.bandung.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=77>.
- Muslikhati, Muslikhati. 2018. "Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2): 73–83. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7>

579

- Nurmainah, Santi. 2013. "Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 20 (2): 131–41.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2018. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Prud'homme, Rémy. 1995. "The Dangers of Decentralization." *World Bank Research Observer* 10 (2): 201–20. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>
- Rahayu, Eta, and Eko Budi Santoso. 2014. "Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Teknik Pomits* 3 (2): 290–95. <http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7296/2088>.
- Riza Fathoni I, Syarifudin D. 2014. "Analisis Tipologi Wilayah Sebagai Arahan Untuk Kebijakan Penyerasian Pengembangan Wilayah." *Jurnal Planologi Unpas* 1 (1): 59.
- Robinson Tarigan. 2012. *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*. Jakarta.
- Sarnowo, Henry. 2017. "Klasifikasi Wilayah Provinsi Di Indonesia" 7 (1): 45–57.
- Satria, Bambang Tri Wisnu. 2016. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penetapan Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Wilayah Timur Tahun 2010-2014." *Ekonomi Pembangunan* 14 (33): 161–77.
- Setiawan, Mohammad Bhakti, and Abdul Hakim. 2013. "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia." *Economia*, 18–26.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Niaga Swadaya.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, Dwi, Muhammad Sri, and Wahyudi Suliswanto. 2015. "Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia)." *Ekonomika-Bisnis* 6: 89–106.